

Pontianak, BERKAT.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kalimantan Barat H. Muhammad Ridwan, SH, MH, mengungkap Gubernur provinsi itu, Drs. Cornelis, MH all out (habis-habisan) untuk membenahi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Untuk mencapai opini terbaik, Gubernur all out benahi laporan keuangan," katanya ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/8).

Dikatakannya, pembenahan laporan keuangan tersebut tidak hanya mengenai aset milik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) saja, tapi aset lainnya juga diinventarisir.

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, sebelumnya mengungkapkan penilaian hasil keuangan Pemerintah Provinsi itu pada tahun 2010 hampir Disclaimer Opinion (DO) atau tidak menyatakan pen-



M. RIDWAN

Gubernur "All Out" Benahi Laporan Keuangan

dapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kalbar, akibat permasalahan aset Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) seluas 64000 meter persegi di kompleks GOR Pangsuma Rontianak.

"Gara-gara aset hampir Disclaimer Opinion," katanya. Ia mengatakan permasalahan aset KONI yang diserahkan kepada pihak ketiga

hanya berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pengelolaan saja.

"Hasil audit nanti akan kita kasi tau ke

dewan. Jadi setelah audit, bisa diproses lebih lanjut. Misalnya ada aset yang mau dihilangkan, dihapus atau dipenjarakan," kesalnya menanggapi ancaman dari DPRD Kalbar perihal surat yang dilayangkan lembaga legislatif tersebut untuk meminta jawaban pemprov Kalbar atas status tanah KONI.

Gubernur Cornelis menyatakan telah melakukan konsultasi ke BPK RI perwakilan Kalbar, Kementerian Dalam Negeri dan BPK Pusat, bahwa audit aset-aset milik Pemprov boleh-boleh saja.

"Ini akan dilakukan untuk semua aset, bukan hanya aset KONI. Agar clear," tegasnya.

Ia meminta kepada DPRD Kalbar untuk tidak saling menyalahkan, karena permasalahan aset yang diminta penjelasan oleh DPRD Kalbar merupakan kesalahan pemimpin terdahulu.

"Nantinya, yang mana belum ada surat, kita buat surat," kata Gubernur Cornelis.

Ia menambahkan, hari Senin (1 Agustus 2011 lalu) berkas agar aset milik Pemprov Kalbar diaudit telah masuk ke BPK dan Cornelis juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membantu menyelesaikan permasalahan aset ini.

"Agar tidak ada saling mencurigai," tambah Gubernur. (nia)